

BAB III

POLITIK DI INDONESIA

A. Landasan Politik Indonesia

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan lonceng kematian bagi zaman kolonialisme Belanda maupun Jepang, dan dengan proklamasi pulalah roda sejarah mulai berputar. Seluruh kebijakan politik yang selama tiga setengah abad berjalan harus berhenti, bahkan ada bagian-bagiannya yang dengan serta merta harus dicampakkan. Diskriminasi perlakuan, seperti yang pada zaman Hindia Belanda menjadi kebijakan politik acuan, tidak pantas lagi dilanjutkan dan harus segera diganti dengan semangat egaliter, yaitu semangat persatuan dan persamaan kedudukan di antara segenap warga negara sehingga segenap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, serta pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.¹

Lalu apa yang terjadi pada masa-masa antara tahun 1945-1965? Seperti telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya peta struktur sosial-politik bangsa belum berubah. Kaum nasionalis sekular yang keberadaannya merupakan warisan zaman penjajah Belanda, demi mencegah terjadinya kevakuman, harus tetap

¹ Hartono Mardjosono, *Politik Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 21.

bekerja untuk meneruskan fungsinya karena yang berubah hanyalah pemerintah dan pemerintahannya. Demikian pula, mereka yang semula menempati posisi sebagai elit bangsa belum berubah. Mereka yang sejak semula telah menjadi anggota PPKI, tetap menduduki posisinya pada badan tersebut yang setelah proklamasi dan disahkannya UUD 1945 berubah nama dan fungsi menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Untuk sementara, sambil menunggu diselenggarakannya Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota-anggota MPR dan DPR, anggota komite diberi fungsi sebagai pengganti kedua lembaga tertinggi/tinggi negara tersebut dan merekalah yang menguasai mayoritas kursi di kedua lembaga tersebut.

Dengan demikian, baik dalam lembaga birokrasi maupun lembaga politik, komposisi kekuatan sosial politik sesudah proklamasi kemerdekaan mayoritas masih tetap dikuasai oleh golongan nasionalis sekular. Keadaan yang mulai berubah setahap demi setahap adalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di luar pemerintahan.² Ketika perekonomian liberal menyebar tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa, administrasi politik atau pemerintahan penjajah masih terikat pada pendirian yang sangat menghindari perluasan kekuasaan (*Onthoudings politiek*).³ Namun ketika tahun 1960-1965 mulai lahir generasi baru bangsa, yaitu

² *Ibid.*, h. 23

³ Parakitri. T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, Cet. 2, 2006, h. 170.

generasi intelektual (semi intelektual) religius islami sebagai buah dari terjadinya mobilitas vertikal dari kalangan generasi anak-anak petani, pedagang, maupun buruh kecil yang mayoritas muslim. Iklim politik saat itu tidak memberi peluang bagi terjadinya mobilitas horizontal di kalangan generasi baru. Sistem politik yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang bersendikan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).⁴

Beberapa tahun sebelum kewafatannya, mendiang Presiden Soekarno melontarkan gagasan tentang Nasionalisme-Agama-Komunisme (Nasakom). Gagasan itu, dalam waktu singkat cepat menjalar, karena didukung oleh kekuasaan beliau, namun tidak sedikit yang menentanginya. Landasan dari pemikiran beliau adalah kekhawatiran akan upaya mengadu domba antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunisme. Golongan agama, di mata beliau hanya diwakili oleh dua kelompok, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan kaum Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan terkadang Partai Murba juga digunakan beliau untuk menjadi penyeimbang dalam menghadapi golongan komunis tersebut. Karena kesulitan dalam menyatukan sikap dan langkah internal golongan Nasionalis, ditambah keterpecahan sangat mendalam di tubuh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), maka mendiang Presiden Soekarno dalam tahun-tahun terakhir hidupnya memberikan tempat sangat besar pada PARTINDO (Partai Indonesia), yang sering dicemooh

⁴ Hartono Mardjono, *loc.cit.*

orang di belakang punggung beliau sebagai PARSOE (Partai Soekarno).⁵

Dengan demikian, meskipun pada masa-masa itu hampir tidak terjadi mobilitas horizontal, namun tanpa sengaja telah terjadi mobilitas vertikal di kalangan umat Islam yang cukup besar dan sangat berarti. Bagi umat Islam terjadinya sumbatan politik pada masa itu, mereka menjadi bersih dari keterlibatannya dengan konspirasi yang dilakukan oleh golongan komunis dan nasionalis seular yang kemudian melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap negara dan pihak lain, karena relatif masih murah biaya pendidikan pada kala itu, mereka banyak yang berhasil melanjutkan studinya dan mencapai hasil-hasil yang cukup baik. Hal itu merupakan *blessing in disguise* yang kelak dapat dirasakan dampak positifnya, setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI.

Dalam aksi penumpasan spontan terhadap PKI dan para pendukungnya terjadi sebuah anomali (penyimpangan) karena penumpasan PKI tidak hanya dilakukan oleh kerjasama antara ABRI dan generasi baru muslim, tetapi juga oleh golongan nasionalis yang berusaha membersihkan dirinya dari pengaruh komunis dan golongan Nasrani yang pada masa-masa sebelumnya

⁵Fakta Sejarah (2012) *Nasakom Sebagai Konsep Negara*, diunduh pada tanggal 5 Maret 2016 dari <http://santri.or.id/gus-dur-islam-nasakok-dan-kita/>

juga menjadi pendukung pemerintahan Nasakom.⁶ Perlu dicatat, pada masa pemerintahan Nasakom kaum komunis berhasil menyelundupkan kader-kadernya ke dalam organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang berlabel nasionalis sekular yang baik pola pikir maupun sikap mereka menjadi sama dengan pola pikir dan sikap kaum komunis.⁷

Nasionalisme sekular hanya merupakan hasil sampingan dari implementasi kebijakan politik Kolonialisme Belanda. Gagalnya pemerintahan kolonial melaksanakan kristenisasi untuk mewujudkan lapisan elit pendukung kolonialismenya pada satu pihak, dan keberhasilan pemerintah kolonial dalam melaksanakan deislamisasi pada pihak lain, telah melahirkan lapisan kelas menengah baru di lingkungan penduduk bumiputra yang tidak menjadi Kristen tetapi telah berhasil dijauhkan dari Islam. Mereka adalah penganut Sekularisme yang hendak secara tegas memisahkan seluruh aspek kehidupan dunia dari ajaran agama. Di negara-negara Eropa, paham sekularisasi telah berkembang dengan cepat dan berhasil memajukan negara-negara mereka dari keterbelengguan pemikiran para pemimpin gereja yang sangat bersifat doktriner karena perkembangan pemikiran di lingkungan bangsa-bangsa Eropa ketika itu memang terpasung oleh ajaran-ajaran agama Nasrani.⁸

⁶Hartono Mardjono, *op.cit.*, h. 25.

⁷*Ibid.*, h. 26

⁸*Ibid.*, h. 59

Bangsa Indonesia sudah meletakkan Indonesia di atas suatu fundamen yaitu Pancasila. Dan telah memilih Pancasila sebagai dasar yang fundamental bagi negara kita karena Pancasila itu sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno. Ernest Renan mengatakan bahwa “Setiap bangsa mempunyai suatu jiwa”. (*Une Nation, est Une ame*). Jiwa bangsa yang satu berbeda dengan jiwa bangsa lainnya. Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa, yang disebut Kepribadian Bangsa Indonesia. Lebih tegas, Pancasila itu adalah merupakan manifestasi dari Kepribadian bangsa Indonesia. Jadi tidak mungkin merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa lain, karena ini a priori akan ditolak oleh bangsa kita.⁹ Di atas dasar ini dapat menyatukan segenap unsur-unsur dari bangsa Indonesia. Tetapi pancasila itu tidak saja merupakan dasar yang statis juga merupakan tuntutan yang dinamis, seperti Bung Karno menyebutkan sebagai “*leidster*”, bintang pimpinan, ke arah mana bangsa dan Negara Indonesia harus digerakkan. Pancasila tidak saja merupakan dasar dari Negara, tetapi juga merupakan jiwa dan pandangan hidup dari Bangsa Indonesia itu sendiri.¹⁰

Prof. Notonagoro menjelaskan, bahwa yang dikemukakan bukanlah Pancasila dalam arti formal, tetapi sifat meterilnya yang dimaksud. Di sisi lain, Bung Karno mengatakan: “Bukankah saya selalu berkata, bahwa Pancasila itu bukanlah bikinan saya, saya

⁹Rozali Abdullah,SH. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 2, 1993, h. 1.

¹⁰ *Ibid.*, h. 5.

gali sudah bertahun-tahun bahkan mulai tahun 1925, 1926 saya menggalinya.¹¹

Pancasila bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Jauh sebelum Bung Karno menemukan Pancasila, sila-sila dari Pancasila itu dalam pengertian materinya atau jiwanya sudah ada di dalam jiwa bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Dari hasil penggalian tersebut, Bung Karno merumuskan seperti apa yang dikemukakannya sendiri di muka Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dulu yang kemudian dikenal dengan nama Bung Karno mengusulkan agar Negara Indonesia yang akan didirikan itu ditegakkan di atas kelima sila yang telah digalinya itu. Karena kelima sila itu telah merupakan jiwa dan milik bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dan menurut Bung Karno sendiri, atas petunjuk seorang ahli bahasa, kelima sila itu diberi nama Pancasila. Kemudian suara bulat sidang menerima Pancasila itu sebagai Dasar Negara yang kekal abadi, yang oleh Bung Karno sendiri disebut *Philosophis Grondslag*, dengan rumusan kalimat sebagai berikut:

1. Kebangsaan Bangsa
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹ Prof . Mrs. Mr. Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara RI*, Bina Aksara, Jakarta, h. 42.

Pancasila itu sudah menjadi milik dari Bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang, Pancasila itu telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan merupakan ilham yang timbul dari hati sanubari Bung Karno. Jauh sebelum Bung Karno menggalinya, Pancasila sudah terkandung di dalam jiwa bangsa Indonesia dan dari jiwa bangsa Indonesia itulah Bung Karno memperolehnya.¹²

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik maupun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

B. Politik di Indonesia Era Orde Baru-Reformasi

Masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, ditengarai oleh momentum politik berupa pembubaran PKI dan antek-

¹² *Ibid.*, h. 9.

anteknya. Lebih dari itu pemerintahan Orde Baru membatasi gerak dan seterusnya menggeser demokrasi dipimpin di bawah Ir. Soekarno dari gelanggang Politik nasional serta menumbuhkan citra akan memperbaiki keadaan, terutama kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dengan keputusan politik ini, segera sesudahnya juga dilancarkan usaha-usaha yang berdampak pada kehidupan politik, depolitisasi dan deideologi. Disadari atau tidak kebijakan politik yang ditempuh Orde Baru dengan konsep *floating mass* (massa mengambang), menjadi indikasi lain dari depolitisasi rakyat. Demikian juga larangan bagi Masyumi untuk berdiri kembali dan larangan Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI, mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Imbasnya lebih jauh nampak pada pengurangan jumlah parpol sesuai kehendak atas, serta kontrol pers yang cenderung represif.¹³

Rezim Orde Baru memiliki cara-cara tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir tidak ada institusi politik di negeri ini tidak berada dalam kontrol Presiden., terutama setelah Orde Baru memasuki periode Stalinist. Lembaga Kepresidenan begitu kuat, menjadikan kabinet berada dalam posisi subordinatif, dan bahkan parlemen tidak berdaya menghadapi kekuasaan eksekutif, termasuk lembaga peradilan yang tidak bisa berdiri secara independen, sehingga kesemuanya menjadi instrumen

¹³ Adi Sasono et.al, *Demitologisasi Politik Indonesia*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998, h. xxi.

kekuasaan rezim Orde Baru.¹⁴ Dengan realitas semacam itu maka iklim politik masa-masa awal Orde Baru dipandang belum kondusif atau tidak cukup sehat bagi pijakan pembangunan secara menyeluruh. Baru menginjak paruh dekade 80-an, langit politik di Indonesia mulai menguak atmosfer yang lebih terbuka dan terasa dinamis. Ketika itu kita disemarakkan oleh perbincangan di seputar masalah transparansi atau keterbukaan.

Keterbukaan di Indonesia lebih pada bidang ekonomi, dalam pidato 16 Agustus 1990, sinyal keterbukaan politik lewat apa yang dikatakan Presiden dengan adanya peluang untuk berbeda pendapat. Sinyal tersebut makin dipertegas oleh Presiden oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tahun berikutnya di depan Sidang kan niat-niat pemerintah untuk sesegera mungkin menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial dalam bentuk pemerataan hasil pembangunan. Demokrasi sendiri terutama beberapa tahun terakhir menjadi topik yang banyak diminati dalam berbagai forum diskusi maupun perbincangan keseharian. Sebagaimana lazim diketahui salah satu sistem politik yang dianggap paling baik dan diobsesikan mokrasi tak ubahnya ramuan yang berfungsi preventif maupun kuratif atas penyakit atau masalah-masalah dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik (Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik)*, UGM Press, Yogyakarta, 2010, h. 242.

¹⁵ Adi Sasono et.al, *loc.cit.*

Pemerintahan Orde Baru muncul setelah terjadinya kudeta oleh Gerakan 30 September 1965. Presiden Soekarno memberi perintah kepada Jenderal Soeharto Panglima Komandan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) untuk mengatasi situasi politik yang sedang kacau. Situasi kacau lainnya adalah runtuhnya ekonomi negara dengan inflasi yang sangat tinggi, seperti terlihat pada pendapatan perkapita di tahun 1966 yang hanya 120 dollar AS. Dengan landasan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Jenderal Soeharto membangun pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berorientasi kepada modernisasi politik dengan memegang teguh pada Ideologi pembangunan. Setelah itu, pemerintah Orde Baru melakukan deideologisasi aliran politik, stabilitas politik sosial, serta pembangunan ekonomi dengan penuh optimis.¹⁶

Dengan demikian, pada tahun 1960-an, kaum Intelektual pendukung Orde Baru telah memiliki landasan teoritis yang kuat untuk mengajukan suatu modernisasi politik yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Suatu pembangunan masyarakat yang bebas dari konflik ideologi.¹⁷ Ini berarti lebih didasarkan kepada pragmatisme dan rasionalisme. Kalangan militer, khususnya perwira Angkatan Darat, memang membutuhkan mitra dalam melakukan pembersihan terhadap anasir-anasir Orde Lama. Oleh karena itu gagasan kaum Intelektual

¹⁶ Abdul Syukur et.al, *Indonesia dalam Sejarah (Orde Baru dan Reformasi)*, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 400.

¹⁷ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, LP33ES, Jakarta, 1986, h. 137.

itu diterima dengan tangan terbuka. Pilihan strategi yang dilakukan pemerintahan Soeharto adalah rekayasa politik melalui sejumlah peraturan kebijakan politik. Kebijakan itu berupa restrukturisasi partai-partai politik, yakni peleburan (fusi) partai, penerapan kebijaksanaan masa mengambang (*floating mass*), serta pengintegrasian dan pendekatan keamanan (*security approach*), konsensus, dan tekanan dengan menggunakan instrumen mesin birokrasi. Demikian kuatnya peranan birokrasi, maka masa pemerintahan Orde Baru disebut sebagai politik birokratis (*Bureaucratic policy*).¹⁸

Kekuatan politik di luar birokrasi seperti partai politik, parlemen, pers, maupun kelompok-kelompok kepentingan sangat lemah dalam mengontrol birokrasi, bahkan harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan kepentingan yang menguntungkan birokrasi.¹⁹ Penataan kepartaian juga dilakukan dengan cara membangun birokrasi yang fungsional, efektif, dan tanggap terhadap kehendak pimpinan eksekutif.²⁰ Kekuatan partai-partai politik dilumpuhkan dan dihilangkan kemandiriannya dengan menempatkan orang yang dapat bekerjasama dengan menempatkan

¹⁸ Politik Birokrasi (Beureactic Polity) ialah suatu sistem politik dengan kekuasaann dan partisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan nasional sangat terbatas pada lingkungan pegawai pemerintahan terutama para perwira-perwira militer serta pejabat-pejabat tinggi birokrasi yang termasuk di dalamnya para teknokrat.

¹⁹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995, h. 89.

²⁰ *Ibid.*, h. 150.

orang yang dapat bekerjasama dengan pemerintahan sebagai pimpinan partai. Untuk mengefektifkan kontrol atas kekuatan politik partai, pemerintah melakukan fusi partai sesuai keinginan pemerintahan dengan platform perjuangan “*asas tunggal Pancasila*”.

Partai politik yang berbagai bentuk merupakan satu unsur warisan. Biasanya “partai” merupakan badan parlemen sementara yang tidak mempunyai organisasi karena banyak hal, ia dibentuk atas keputusan pihak pemerintah, walaupun dalam kasus peranan partai itu hanya untuk meletuskan kepada pemimpin yang tak berpartai mengenai perasaan tidak senang yang mungkin terdapat di kalangan rakyat pada kasus lain menunjukkan bahwa partai tersebut memainkan peranan yang sama seperti partai politik yang terdapat di Eropa Barat dan Amerika Serikat.²¹

Perjalanan partai-partai politik dalam pengertian ini termasuk Golkar seperti nampak pada sepanjang 1995 diwarnai oleh sejumlah peristiwa politik menarik. Beberapa peristiwa menonjol itu di antaranya adalah kemelut Dewan Pemimpin Daerah (DPD) kembar PDI Jawa Timur yang tidak kunjung selesai yang tidak jarang dihubungkan sebagai bagian dari upaya “penggoyangan” atas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP). Peristiwa-peristiwa tersebut dan banyak peristiwa politik lain yang memperkaya pengetahuan

²¹ Fred. R. Von Der Mehden, *Politik Negara-negara Berkembang*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 75.

empiris kita, tidak hanya merupakan potret parpol dewasa ini, tetapi juga menggambarkan sebagian wajah politik Indonesia. Bahkan, barangkali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa politik itulah sesungguhnya yang bisa memberikan gambaran objektif dan jujur tentang bagaimana dan di mana tempat parpol dalam format politik Orde Baru; apa persepsi dan cara pandang atasnya; serta bagaimana kalangan parpol sendiri mendefinisikan dan menempatkan diri, baik di dalam cetak biru politik Orde Baru maupun di tengah tuntutan perubahan yang begitu gencar di masyarakat. Karena itu, berbagai peristiwa politik yang berkaitan dengan parpol, tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa bagi parpol belaka yang berdiri dan terpisah dari arah dan kecenderungan politik nasional, tetapi justru menjadi bagian daripadanya, setidaknya merupakan indikasi kuatnya tarik-menarik antara dua realitas yang saling bertolak belakang, kecenderungan untuk melestarikan status *quo* politik di satu pihak dan tuntutan demokratisasi dan perubahan pada umumnya di sisi lain.²²

Sejumlah persoalan yang dihadapi partai seperti diuraikan di atas sebenarnya bisa memberikan gambaran awal tentang kedudukan partai dalam format politik Orde Baru. Tetapi, barangkali akan lebih menarik jika rangkaian peristiwa itu dilengkapi dengan perdebatan langsung tentang soal itu antara salah seorang pemimpin partai dan Mendagri selaku pembina

²² Adi Sasono, et.al, *op.cit.*, h. 65.

politik nasional. Jika diperhatikan persoalan di atas, memang ada kesenjangan antara harapan tentang partai di satu pihak dan realitas tentang posisi partai di dalam format politik yang berlaku di pihak lain. Pada tataran harapan, ada obsesi tentang kemandirian partai DPR yang kuat, dan demokrasi yang berkualitas. Tetapi, pada saat yang bersamaan harapan itu sendiri sesungguhnya adalah mimpi atau utopia, karena berbagai *beleid* yang berlaku bagi partai-partai dirancang agar organisasi-organisasi peserta pemilu itu tidak bisa mandiri, dan pada gilirannya tidak bisa pula menghasilkan DPR serta demokrasi yang lebih berkualitas. Pembatasan komunikasi partai dengan massa melalui kebijakan “massa mengambang” pembatasan hubungan pemilih dengan calon/ wakil mereka melalui sistem pemilu proporsional, pembatasan jumlah partai/OOP, Penyeragaman asas bagi partai-partai, dan diskriminasi birokrasi atas PPP dan PDI, serta pengistimewaan atas Golkar melalui *beleid* pembinaan politik adalah faktor-faktor yang menjadikan obsesi pemberdayaan partai tidak relevan.²³

Memasuki 1998, bangsa Indonesia kemudian berhasil melakukan reformasi. Melengserkan rezim monolitik. Negara lalu bukan saja mengalami delegitimasi, tetapi juga demoralisasi di mata masyarakat. Sejak itu posisi *bargaining* masyarakat meningkat, sehingga suara mereka jauh lebih ber-daya, sekurang-kurangnya dibandingkan dengan era sebelumnya. Bangsa Indonesia lalu memulai era baru dengan semangat membangun

²³ *Ibid.*, h. 93.

sistem yang demokrasi. Era ini nampak lebih menjanjikan ruang partisipasi bagi elemen masyarakat dalam berbagai kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Sudah barang tentu, dalam perkembangan sedemikian, perspektif pemikiran Islam Politik pun akhirnya juga memperoleh ruang untuk mengaktualisasikan aspirasi politiknya di permukaan. Namun, yang perlu dicatat bahwa format Islam Politik sudah berubah, tidak selalu skriptual, legal dan formal, oleh karena sebagian di antaranya telah mengalami transformasi menjadi Islam Politik yang dikembangkan atas dasar pemahaman Islam yang lebih obyektif dan substantif. Mereka menjadi kekuatan nasionalis sekuler maupun agama lainnya, terutama Katolik dan Kristen, masing-masing mendirikan partai politik dan mengikuti Pemilu 1999.

Banyak partai yang secara struktural mengikatkan diri dengan Islam, antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Masyumi, Partai Umat Islam, Partai Nahdlatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai SUNI, Partai Persatuan dan tentu juga partai “lama” yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di samping itu, lahir juga partai Islam Politik yang tidak terlalu mengedepankan formalisme, legalisme dan skriptualisme. Jika melihat hasil pemilu 1999 maka nampak bahwa partai-partai tersebut ternyata tidak menunjukkan perolehan suara yang signifikan. Hanya PPP yang berhasil meraih 58 kursi, disusul PKB 51 kursi di parlemen, sedangkan yang lain di bawah 50 kursi. Akan tetapi, di parlemen, partai “Islam Politik” ini

melakukan aliansi strategis dengan membentuk kelompok yang mereka sebut “Poros Tengah”. Aliansi ini benar-benar berhasil melibatkan dominasinya di parlemen. Beberapa proses voting dalam Sidang Umum MPR 1999.²⁴

Dalam pergumulan di level elit politik, isu agama nampak cukup efektif dihadapkan lawan politiknya, dan hal itu nampak disadari sebagai kendala bagi perjuangan PDI-P. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri lalu sedikit berimprovisasi dengan ikut menggunakan simbol-simbol yang bersumber dari agama.²⁵

Di era reformasi, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, partai Islam di tahun 1999 mengalami situasi yang sedikit berbeda. Kushrido dalam bukunya menjelaskan, tidak satupun partai yang mengklaim sebagai partai Islam menegaskan secara eksplisit agenda mereka untuk mendirikan negara Islam- paling tidak masa sebelum Pemilu.

Panggung politik di negeri ini semakin diperkaya dengan berbagai kosa kata. Fenomena politik, juga bisa diartikan fenomena itu sebagai wujud dari kreatifitas sang politikus, atau bisa jadi kedua-duanya memang kreatif.²⁶ Wacana tentang politikus busuk, politikus yang dinilai melakukan tindakan tercela itu kemudian mengundang polemik, mulai dari warung kopi sampai ke meja dan

²⁴ Zainuddin Maliki, *op.cit.*, h. 257.

²⁵ *Ibid.*, h. 259.

²⁶ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk*, Galang Press, Yogyakarta, 2004,

kantor para elite politik di parlemen maupun di birokrasi. Elite politik seharusnya menjadi pelaku pencerahan dan pendorong terjadinya perubahan. Namun, lapisan ini tampak tidak lagi berada di tangan politikus yang memiliki komitmen yang besar untuk membangun demokrasi, budaya politik yang membebaskan masyarakat dari krisis. Kekuasaan elite yang miskin idealisme itu begitu besar sehingga menyingkirkan elite yang memainkan peran kritis. Tidak ada gerakan *counter elite* yang diharapkan bisa berbuat secara efektif untuk mengimbangi dan bilamana perlu mengambil alih peran elite, supaya politik dengan berbagai keragaman, fungsi dan nilai-nilai yang hendak dikembangkan mengarah kepada pengembangan kehidupan yang lebih baik.²⁷

Ketiadaan kekuatan *counter elite* menyebabkan gampangnya elite terseret ke dalam arus pembusukan politik. Proses pembusukan itu terasa sangat cepat. Bandingkan dengan proses pembusukan politik yang terjadi di masa lalu. Awal tahun 2000-an sudah terjadi persebaran dan intensitas permainan politikus busuk dengan skala massif. “Elite Politik baru” menguasai panggung kekuasaan, lalu dengan kekuasaan yang luar biasa nyaris tanpa kontrol publik yang efektif digunakannya untuk memperkaya diri sembari membebankan ongkosnya kepada rakyat dengan cara memperbesar gaji mereka dalam kelipatan jumlah yang luar biasa. Praktik busuk lain yang tergambar dalam permainan penguasa politik yang merangkap di birokrasi

²⁷ *Ibid.*, h. 5.

pemerintahan (*the governing political elite*), mereka tidak tahu atau memang sengaja mengaburkan batas antara ranah privat dengan ranah publik.²⁸ Melihat logika berpikir politikus di parlemen, maka nyata benar bahwa aroma *politics for itself* sangat kental. Praktik politik demikian tentu kita tidak dapat terlalu berharap untuk bisa membangun pemerintahan yang memiliki *state capacity* yang jelas dalam menyelesaikan krisis, karena elite politik yang tengah memegang kekuasaan itu sendiri ternyata menjadi sumber dan biang krisis.²⁹

Pesta demokrasi di republik ini, benar-benar telah menjadi ajang ring tinju bagi para politisi yang bermasalah. Tidak peduli apakah sang politisi itu adalah pendatang baru, laki-perempuan maupun politisi *lawas*, jika ia terindikasi dalam lilitan masalah, alamat akan “dibantai” habis-habisan. Tidak saja oleh orang para simpatisan partai, tapi jua oleh rival politiknya. Baik itu yang ada di dalam partainya sendiri maupun dari partai lain.

Jika seperti ini, maka sang politisi pun nanti akan menjadi agak edan dan cenderung mudah *sewot*. Maklum, pemilu di era reformasi ini, bukan cuma sekadar menjadi syarat bagi adanya demokrasi. Tapi juga dalam rangka untuk mencari wakil rakyat dinilai masih kurang merakyat. Apalagi wakil rakyat yang telah duduk di kursi dewan yang cukup empuk itu. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana calon legislatif yang

²⁸ *Ibid.*, h. 6

²⁹ *Ibid.*, h. 8.

bermasalah secara moral, hukum maupun politisi, dapat dengan santainya berlenggak-lenggok di atas ring Pemilu seperti seorang peragawati di atas *catwalk* dengan mengandalkan tumpukan uang dan jaringan koneksi yang luas terutama di level atas seorang politisi yang bermasalah dan tak punya dukungan riil di masyarakat, dalam sekejap bisa masuk pada daftar calon legislatif dengan nomor urut jadi.

Bahkan tidak hanya itu, Jika termasuk dalam golongan kaum berduit, maka, selain mendapat fasilitas kemudahan dalam segala urusan keparpolan, dia juga akan dihormati dan dibela mati-matian oleh parpol yang telah mencalonkannya untuk jadi anggota legislatif. Pembelaan tersebut, sudah datang tentu, dilatarbelakangi oleh pertimbangan uang. Singkat kata, pada Pemilu zaman Orde Baru, uang atau status sosial seseorang, betul-betul jadi panglima sekaligus tiket masuk untuk bisa menjadi anggota-anggota legislatif dengan kualifikasi *very-very important person* (VVIP). Di samping, sudah barang tentu, yang tak kalah pentingnya lagi adalah, dia jika harus punya uang banyak, untuk “dibagikan-bagikan” pada pemilih/partisipan partai dan jaringan koneksi di level vertikal maupun horisontal. Dua hal tersebut belakangan itu, sifatnya harus disembunyikan. Sebab, jika sampai tercium pihak berwajib, maka calon pun akan didiskualifikasi oleh Panwaslu atau KPU.³⁰

³⁰ Abu Azka Fathin Mazayasyah, *Jangan Percaya Politikus*, Magma Pustaka, Yogyakarta, cetakan pertama, 2007, h. 71-72.

Saat ini dapat disaksikan adanya persebaran rasa tidak percaya yang terus meluas kepada para pemimpin yang ditandai dengan semakin maraknya berbagai gerakan protes. Persoalannya bukan terletak pada masyarakat, tetapi pada perilaku elit penguasa. Saat ini kita tidak memiliki apa yang disebut Fukuyama dengan *the trusted leader*, tokoh yang bisa dipercaya karena integritas moral visi dan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan ke pundak mereka. Ketiadaan *the trusted leader* dalam komposisi elite politik dan penguasa di negeri ini, menjadikan masyarakat bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Di tengah para pemimpin bergulat memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, masyarakat mencoba sendiri dalam usaha mencari pemecahan setiap persoalan. Masyarakat harus mengatasi sendiri menghadapi beban ekonomi, bencana alam, tanah longsor, banjir maupun kecelakaan lalu lintas.

Fukuyama meyakinkan kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini, bahwa hanya masyarakat yang layak disebut sebagai *the high trust society* saja yang bisa mencapai kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang rendah tingkat kepercayaannya disebut *the low trust society* akan menjadi bangsa yang terpuruk. Rasa percaya akan memberi iklim yang kondusif untuk mengembangkan kepribadian, menanamkan investasi, memperlebar jaringan sosial maupun ekonomi. Sebaliknya rendahnya rasa percaya, apalagi jika

berubah didominasi oleh prasangka, akan hilang peluang investasi serta upaya mengembangkan kehidupan ini.³¹

Masyarakat belum bisa menumbuhkan budaya saling percaya. Kalau kita melihat rangkaian konflik antaretnis maupun agama, konflik pusat dan daerah, sipil dan militer, antara politikus dan non-politikus, *state* dan *civil society*, sehingga keadaan begitu runyam, saling jegal, sikut-sikutan antar elemen dan golongan dalam masyarakat, tampaknya masih tergolong alam bagian *the low trust society*, atau jangan-jangan sebenarnya mengalami *zero trust society*, masyarakat yang memang tidak memiliki rasa saling percaya. Oleh karena itu, kita belum bisa memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi. Pembangunan sosial, ekonomi, politik kita akhirnya masih saja menelan ongkos yang cukup mahal. Untuk keluar dari krisis ini, sekali lagi, jawabannya adalah membangun *trust*, membangun sikap saling percaya.³²

Di sisi lain, elite politik merasa nyaman berdamai dengan penyimpangan, derajat kepercayaan rakyat terus saja merosot terhadap elite partai, dan tentu juga pemerintahan yang dihasilkannya. Rakyat kemudian tetap saja bergulat dengan lingkaran ketidakadilan dan praktik-praktik penyimpangan elite yang tak terselesaikan. Meski kini terbuka saluran bagi rakyat menyuarakan aspirasi dan melakukan gerakan perlawanan, tetapi suara rakyat dan gerakan perlawanan itu tampak tidak

³¹ Zainuddin Maliki, *op.cit.*, h. 24.

³² *Ibid.*, h. 27.

menghasilkan sesuatu yang berarti. Suara dan gerakan *counter elite* yang dilakukan rakyat selama ini masih saja terus berjalan, sebut saja misalnya gerakan yang cenderung massif belakangan yang diperlihatkan oleh karyawan PT. Dirgantara Indonesia.

Oleh karena itu, tidak benar jika budaya damai dengan penyimpangan dan ketidakadilan telah tumbuh di masyarakat bawah. Sebaliknya budaya damai dengan penyimpangan dan ketidakadilan itu justru tumbuh di kalangan elite politik, pengelola kekuasaan di negeri ini. Jika gerakan *counter elite* yang digelar masyarakat tidak mengubah perilaku elite, bukan berarti budaya damai dengan penyimpangan itu telah menjalar sampai ke akar rumput. *Counter* atau gerakan perlawanan terhadap elite itu tidak efektif karena memang ada gejala munculnya sikap oligarkis di tangan elite partai politik. Dari sinilah lalu ditemukan praktik-praktik penyimpangan elite yang selalu saja tidak tertangani secara tuntas. Ketidakadilan ekonomi maupun politik tidak kunjung mengalami perbaikan, justru sebaliknya, malah mengalami pelembagaan. Pesimisme terhadap cara elite menangani penyimpangan dan ketidakadilan lalu meluas.

Masyarakat sampai hari ini bukan disuguhi akuntabilitas, sikap yang transparan dan adil dari para penguasanya. Sebaliknya, masyarakat disuguhi sikap ketenangan elite menikmati *privilese* yang mulai kembali tak bisa disentuh oleh kontrol publik. Mereka berdamai dengan sesama elite dalam penyimpangan, sehingga korupsi dan ketidakadilan menjadi tabiat politik yang masih saja

terus meluas.³³ Sungguh negeri ini hingga sekarang masih mewarisi sistem yang timpang dan terdistorsi. Di masa lalu negara mendistorsi ekonomi dan politik, di masa kini elite politiklah yang bertanggung jawab terjadinya distorsi sistem ekonomi dan politik di negeri ini. Siapapun yang mendistorsi, maka akibatnya sama bagi rakyat, yakni dalam sistem yang terdistorsi, ekonomi, politik akan berjalan dengan biaya tinggi, akibatnya derajat produktifitas dan budaya saing masyarakat menjadi melemah.³⁴

³³ *Ibid.*, h.30-31.

³⁴ *Ibid.*, h. 33.